

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Umum*. Penerbit PT RajaGrafindo. Kota Jakarta. 1996
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. PT RajaGrafindo. Jakarta. 1993.
- Diana Sari. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Rapika Aditama. 2013.
- Lathifah Hanim dkk. *UKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, Unissula Press. Universitas Islam Sultan Agung. 2018.
- Maria Farida. *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. 2015.
- Nugraha Setiawan. *Teknik Sampling*. Penerbit Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal. 2005.
- P. J. A. Adriani. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta. Gramedia. 2005.
- Philippus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gadjah Mada. Yogyakarta University Press. 1993.
- Ridwan Hr. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Safri Nugraha, dkk. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 2005.
- Siti Resmi. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2008.
- Yusri Munaf. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing. Riau. 2017.
- Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas perubahan keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan No. 147 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-04/Pj/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

C. Skripsi/Tugas Akhir

Ade Resalawati, 2011, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Ukm Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Feni Ika Irianti, 2019, *Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember*, Tugas Akhir, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember.

Indri Tri Novita, 2020, *Aspek Hukum Penggunaan E-Money Brizzi Dalam Pembayaran Jasa Bus Trans Padang*, Skripsi, Universitas Andalas.

Rachmad Thovany Anuar, 2021, *Proses Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru*, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Toni Brackin, "Taxation as Component of Financial Literacy: How Literate are Australian in Relation to Taxation," *Thesis*, Griffith University, No. 2. 2014.

D. Jurnal

Bawono Kristiaji, dkk, 2022, "Policy Note: Tinjauan dan Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UKM dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UKM", *Jurnal DDTC Fiscal Research & Advisory*, Vol. 1 November 2022.

Evie Rachmawati, dkk. "Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Adil: Jurnal Hukum* Vol. 14 No.1.

Feni Dwi Anggraeni, dkk, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal", Universitas Brawijaya, Malang.

Herman, "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara", Vol. 1 No. 1 Februari 2015, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2015.

Ibram, "Perpajakan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Universitas Bina Sarana Informatika*, 2020.

Mohammad Sahlan, "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi", *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 23 April 2016.

Muh. Afdal Yanuar, "Optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan." *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia (Scientax): Dirjen Pajak RI*. 2021.

Nurul Aisyah, "Pengaruh PPh Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Pada PT. Detecon Asia-Pacificltd", *Jurnal Moneter* Vol. II No. 1 April 2015, Program Studi Sistem Informasi Universitas Pelita Harapan. 2015.

Nurul Susanti, "Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang", *Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 2021.

A. Internet

Anggit Kuncoro Adi, 2021, "Tak Berpenghasilan, Wajib Pajak Bisa Ajukan Non-Efektif", diakses melalui <https://pajak.go.id/id/artikel/tak-berpenghasilan-wajib-pajak-bisa-ajukan-non-efektif> pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 11.45 WIB.

Asian Development Bank (ADB), 2020, "*Regional : Supporting Recovery by Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in the Pacific from the Effects of the COVID-19 Pandemic*", diakses melalui

<https://www.adb.org/projects/54257-001/main> pada tanggal 30 Juni 2023 Pukul 14.20 WIB.

Badan Pusat Statistik Kota Padang diakses melalui <https://padangkota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik RI diakses melalui <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>

BRI. API. “Digitalisasi UKM Dongkrak Pendapatan UKM di 2022.” Pentingnya Digitalisasi UKM di Tahun 2022 (bri.co.id) diakses pada 26 Agustus 2023 Pukul 21.24 WIB.

Direktorat Jenderal Pajak, 2021, “Omzet Tak Lebih Rp500 Juta, UKM Wajib Laporkan Pajak”, Omzet Tak Lebih Rp500 Juta, UKM Wajib Laporkan Pajak | Direktorat Jenderal Pajak, diakses pada 3 September 2023 pukul 12.12 WIB.

Fitriya, 2023, “Jenis Kantor Pelayanan Pajak dan Struktur KPP Pratama”, diakses melalui Jenis Kantor Pelayanan Pajak dan Struktur KPP Pratama (klikpajak.id)

Heru Yulianto, 2023, “Apakah UKM Perlu NPWP? Berikut Syaratnya”, diakses melalui Apakah UKM Perlu NPWP? Berikut Syaratnya - PAJAK.COM, pada tanggal 10 November 2023, pukul 09.23 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Menkeu Apresiasi Wajib Pajak Laporkan SPT” diakses pada <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Apresiasi-Wajib-Pajak-Lapor-SPT>

Kementerian Koperasi dan UKM, 2019, “Data UKM”, diakses melalui <https://kemenkopukm.go.id/data-UKM> pada tanggal 30 Juni 2023 Pukul 16.45 WIB.

Klikpajak, 2022, “Kantor Pelayanan Pajak”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak pada 09 November 2023 Pukul 11.12 WIB

B. Lain-Lain

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022

Laporan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023